

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis reorientasi kebijakan keamanan maritim Indonesia di kawasan Laut Natuna Utara pada era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif serta kerangka teoretis *Two Level Game Theory* dan konsep keamanan maritim menurut Christian Bueger, dapat disimpulkan bahwa kebijakan maritim Indonesia mengalami perubahan yang signifikan baik secara substansi maupun pendekatan strategis. Kebijakan yang sebelumnya lebih bersifat simbolik dan reaktif, pada masa pemerintahan Prabowo berkembang menjadi strategi yang lebih terstruktur, integratif, dan multidimensi.

Reorientasi tersebut mencerminkan transformasi dalam cara pandang pemerintah terhadap isu keamanan maritim, yang tidak hanya dipandang sebagai masalah militer semata, tetapi juga sebagai isu geopolitik, ekonomi, dan sosial yang saling terkait. Pendekatan ini terefleksi dalam penguatan pertahanan laut melalui modernisasi alutsista dan peningkatan kehadiran militer di Natuna, penguatan diplomasi maritim melalui kerja sama internasional, serta pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pembangunan infrastruktur ekonomi kelautan. Semua langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga kedaulatan nasional serta menciptakan stabilitas dan kesejahteraan di kawasan perbatasan maritim strategis.

Dari perspektif *Two Level Game Theory*, kebijakan yang dijalankan pemerintah Indonesia berada dalam ketegangan antara kepentingan domestik dan tekanan internasional. Di satu sisi, pemerintah harus menanggapi tuntutan aktor-aktor domestik seperti militer, nelayan, dan opini publik untuk melindungi kedaulatan negara. Di sisi lain, Indonesia harus tetap menjaga relasi diplomatik dan kerja sama ekonomi dengan mitra strategis seperti Tiongkok. Ketegangan inilah yang kemudian membentuk dinamika kebijakan luar negeri Indonesia di kawasan Laut Natuna Utara, yang mencerminkan kompleksitas negosiasi dua level sebagaimana dijelaskan oleh Putnam.

Sementara itu, jika ditinjau dari pendekatan Christian Bueger, kebijakan maritim era Prabowo juga mencerminkan integrasi dari empat dimensi utama dalam keamanan maritim: kekuatan laut (*sea power*), keselamatan laut (*marine safety*), ekonomi biru (*blue economy*), dan keamanan manusia (*human security*). Penguatan alutsista dan sistem pertahanan maritim menunjukkan dimensi *sea power* yang dominan, sedangkan kerja sama internasional dan pembentukan sistem pengawasan terpadu mencerminkan perhatian pada *marine safety*. Di sisi lain, pembangunan kampung nelayan, pengembangan perikanan berkelanjutan, dan perluasan infrastruktur kelautan menunjukkan upaya konkret dalam mendukung *blue economy*. Sementara itu, keterlibatan masyarakat lokal serta peningkatan kesejahteraan komunitas pesisir mencerminkan pemahaman yang kuat terhadap pentingnya *human security* dalam menjaga stabilitas wilayah perbatasan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan keamanan maritim Indonesia di bawah Presiden Prabowo merupakan hasil dari pendekatan holistik

yang menggabungkan dimensi militer, diplomasi, ekonomi, dan sosial. Kebijakan ini tidak hanya dirancang untuk menjaga wilayah kedaulatan nasional, tetapi juga untuk memperkuat legitimasi Indonesia sebagai negara kepulauan yang berdaulat, strategis, dan adaptif terhadap tantangan geopolitik abad ke-21.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil temuan dan analisis dalam penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang dapat diajukan untuk pengembangan kebijakan maritim Indonesia di masa mendatang. Pemerintah Indonesia perlu memperkuat sinergi antar lembaga terkait seperti TNI Angkatan Laut, Bakamla, Kementerian Luar Negeri, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan keamanan laut secara terpadu. Fragmentasi kewenangan yang masih terjadi dapat menghambat efektivitas kebijakan, sehingga dibutuhkan sistem koordinasi yang lebih sistematis dan terintegrasi, termasuk dalam hal pertukaran data, operasi patroli bersama, dan pengambilan keputusan strategis.

Selain itu, penting bagi pemerintah untuk mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Keamanan Laut yang dapat memberikan dasar hukum yang kuat bagi penyatuan fungsi-fungsi pengawasan maritim. Kerangka regulasi yang jelas akan memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi tantangan keamanan maritim, baik yang bersifat tradisional maupun non-tradisional, serta meningkatkan kapasitas negara dalam menanggapi pelanggaran wilayah dan aktivitas ilegal di ZEE Indonesia.

Di sisi lain, kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir perlu diperkuat melalui pendekatan partisipatif. Program pembangunan kampung nelayan, pelatihan keterampilan maritim, serta akses terhadap sumber daya ekonomi harus dikembangkan secara inklusif dan berkelanjutan. Keterlibatan aktif masyarakat lokal tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan mereka, tetapi juga memperkuat pertahanan sipil dan legitimasi klaim kedaulatan Indonesia di wilayah-wilayah perbatasan laut.

Bagi akademisi dan peneliti, kajian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi dampak jangka panjang dari reorientasi kebijakan maritim ini terhadap posisi strategis Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Penelitian komparatif antar periode pemerintahan atau studi kasus tentang implementasi kebijakan maritim di daerah perbatasan seperti Natuna, bisa memberikan kontribusi besar dalam memperkaya literatur hubungan internasional dan keamanan kawasan.

Dengan mengintegrasikan strategi pertahanan, diplomasi maritim, serta pemberdayaan masyarakat lokal, kebijakan keamanan maritim Indonesia diharapkan mampu menjawab tantangan geopolitik yang semakin kompleks, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan maritim utama di Indo-Pasifik.